

MASALAH, POTENSI, DAN SUMBER DAYA SOSIAL DAERAH TERTINGGAL

(Studi Kasus Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong – Kabupaten
Lombok Barat)

Sutaal

ABSTRACT

Remote area has been described as limited facilities in terms of both social and economy. The area has also less reached by development program. Because of that then one among various characters of remote area is the high numbers of poor people and less human resources. This research has tried to find various informs about remote areas. Moreover, it will recommend for government in order to overcome the problem of remote area. The research has been conducted in Buwunmas rural, district Sekotong, Lombok Barat. The research shows that main problem of the people is poverty, that impacts on the inadequate dweller, neglect, and problems of migrant worker family. Even though Buwunmas has enough natural resources but has not enjoyed by its people. The gold mining and the result has still for the capital owners. The impacts of programs that have ever done at this rural have also not brought their welfare. This case is related to inadequate study of local condition. Based on this finding, it is recommended to conduct social development program, infrastructure development, and alternatives developments program such as social empowerment and tourism development.

Keywords: social problems, potencies, social resources.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Nusa Tenggara Barat, antara lain Lombok Barat dikenal sebagai salah satu pemasok tenaga kerja ke luar negeri (TKI/TKW) terbesar selain Jawa Barat (khususnya Indramayu). Besarnya arus pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) ke luar negeri dari suatu wilayah, merupakan salah satu indikator dari kondisi wilayah yang kurang mampu memberikan kehidupan lebih baik kepada penduduknya. Dengan kata lain sering dikatakan sebagai akibat kemiskinan dan kesulitan hidup di daerah asal, mendorong orang untuk bermigrasi.

Daerah tertinggal sebagai contoh, merupakan sebuah gambaran kondisi wilayah yang secara umum sering kurang terjangkau pembangunan secara memadai memiliki sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas, sehingga kemajuannya jauh tertinggal dengan wilayah lain. Sementara itu

pemerintah daerah maupun pusat sering kurang memiliki data yang memadai tentang kondisi masyarakat di daerah tertinggal. Oleh karena itu sering kurang dapat merancang program pembangunan secara tepat sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal.

Sesuai kebijakan pemerintah untuk menyentuh dan meningkatkan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal, maka diperlukan inisiatif program yang responsif dengan kondisi masalah dan kebutuhan suatu daerah. Responsif bukan sekedar reaktif terhadap masalah yang timbul dan ada dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara lokal. Menurut Suharto (2005) perlu adanya perubahan paradigma dari masalah ke kebutuhan; bahwa kesejahteraan sosial bersifat multidimensional, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya difokuskan pada gejala masalah, melainkan pada berbagai determinan yang mempengaruhinya.

Memperhatikan berbagai pemikiran tersebut, maka guna merancang program yang responsif dan tepat, diperlukan upaya studi masalah dan kebutuhan (*need assesment*), termasuk studi tentang potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan masyarakat di daerah tertinggal. Untuk itu maka diperlukan kegiatan penelitian yang berfokus pada *need assesment* dan *potency assasment* di daerah tertinggal. Terkait dengan ini maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (*Puslitbang Kasos*) pada tahun anggaran 2009 mengadakan Penelitian di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Buwunmas Kecamatan Sekotong yang tergolong sebagai desa tertinggal. Fokus utamanya adalah identifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya di daerah tertinggal. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang program-program yang perlu bagi daerah tertinggal, yang dalam hal ini pada masyarakat Desa Buwunmas.

2. Perumusan Masalah

Kebijakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kabinet, menunjukkan begitu seriusnya niat pemerintah untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Upaya ini memerlukan data dan informasi yang akurat tentang kondisi daerah tertinggal, sehingga program yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kenyataan yang ada saat ini data dan informasi yang akurat tentang kondisi masyarakat, masalah kesejahteraan sosial, dan potensi di daerah tertinggal masih sangat terbatas. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa dan bagaimana masalah yang dihadapi masyarakat daerah tertinggal?
- b. Apa dan bagaimana potensi dan sumber daya di daerah tertinggal yang dapat mendukung pembangunan daerah dimaksud?
- c. Alternatif program apa yang dapat dilaksanakan, sehingga terjadi percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Teridentifikasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) pada masyarakat daerah tertinggal.
- b. Teridentifikasinya potensi dan sumber daya yang tersedia guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial daerah tertinggal.
- c. Terumuskannya pilihan-pilihan program/kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Diperoleh informasi tentang masalah, kebutuhan dan sumberdaya daerah, sebagai bahan masukan guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal.

5. Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dalam upaya menggambarkan kondisi obyektif kehidupan masyarakat daerah tertinggal pada aspek: sosial budaya, ekonomi, sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; serta alternatif program yang dapat diterapkan. Oleh karena itu uraian atau penjelasan dalam tulisan ini utamanya dipaparkan secara kualitatif, meskipun tidak terlepas pula dari sajian data/informasi berupa angka atau persentase.

Penelitian ini berlokasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan lokasi desa ditentukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan bahwa desa tersebut merupakan daerah tertinggal kurang tersentuh oleh pembangunan komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain sangat terbatas.

Mengingat keterbatasan anggaran, maka tidak bisa menjangkau seluruh daerah/desa tertinggal yang ada di NTB, maka dalam penelitian ini diambil 1 (satu) lokasi penelitian, yakni: Desa Buwunmas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Desa Buwunmas ini secara keseluruhan meliputi 11 dusun, yakni Lemer, Sepi, Bengkang, Pengantap, Pangsing, Eyt Bau, Kombang, Belongas, Tangin-angin,

Selodong, dan Sauh. Rencana semula akan menjangkau seluruh dusun, tetapi karena keterbatasan anggaran dan waktu yang tersedia, serta luasnya wilayah desa dan sulitnya transportasi antar dusun, maka dalam penelitian ini hanya diambil 6 (enam) dusun. Keenam dusun tersebut meliputi, Bengkang, Pengantap, Pangsing, Eyat Bau, Belongas, dan Selodong.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, dengan cara bergaul dengan warga, mendengarkan pandangan, merasakan keadaan, termasuk isu-isu yang muncul di antara warga masyarakat. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan, antara lain perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan wawancara dilakukan di mesjid, warung, pasar, atau tempat-tempat di mana penduduk melakukan aktivitas. Dengan cara ini diharapkan dapat menjangkau informasi seluas-luasnya. Untuk mendata penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dilibatkan kepala dusun setempat, dengan alasan mereka dianggap paling mengetahui kondisi warganya.

Penelitian ini juga melakukan diskusi terfokus yang bersifat informal. Pesertanya adalah anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jumlah peserta terbatas tidak lebih dari 15 orang, dengan harapan masing-masing orang dapat berkontribusi mengemukakan pendapatnya. Secara garis besar output yang diharapkan dari FGD adalah diketahuinya sejumlah informasi tentang kondisi daerah, masalah dan kebutuhan program pengembangan, serta kriteria lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sebagai penunjang, dipilih pula informan di beberapa instansi daerah yang diperkirakan mempunyai informasi yang dibutuhkan, yakni:

- Instansi Sosial Provinsi
- Instansi Sosial Kabupaten
- Instansi terkait di Kabupaten.

Analisis data dilakukan dengan cara menyusun data berdasarkan atas golongan atau kategori. Selanjutnya diadakan interpretasi dengan cara memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Dengan cara ini diharapkan gejala-gejala yang kompleks dapat dideskripsikan dengan jelas.

II. TINJAUAN TEORITIS

1. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pada saat ini terdapat 22 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang telah diidentifikasi Departemen Sosial untuk ditangani, antara lain: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, tunasusila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan napza, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar, penyandang HIV/AIDS, keluarga rentan (Pusdatin Dpsos, 2002).

Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkait. Faktor penyebab masalah kesejahteraan sosial dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal sekaligus. Faktor internal pada umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural dalam masyarakat. Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aset produksi dapat juga menyebabkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan kurang pangan dan gizi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental.

Faktor eksternal, termasuk dampak negatif dari intervensi pemerintah, lembaga pemerintah, dan pengusaha swasta terhadap masyarakat. Program-program yang bersifat "direktif", dirumuskan dari atas, sering menempatkan masyarakat sebagai penerima dan bukan sebagai subyek pelaku pembangunan. Hal ini berdampak pada ketergantungan masyarakat pada bantuan program dari luar. Meskipun pihak luar sering menyebutkan perlunya partisipasi masyarakat, tetapi sebenarnya lebih me-

ngandung arti perlunya "dukungan" masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Loekman Sutrisno (1995) bahwa aparat pemerintah pada dasarnya mengartikan partisipasi sebagai kemauan masyarakat untuk *mendukung* suatu program yang direncanakan dari atas, bukan oleh rakyat sendiri. Praktek partisipasi yang sering terjadi bukanlah partisipasi dalam arti sebenarnya, tetapi lebih berarti *mobilisasi* rakyat.

Secara umum Pusat Data dan Informasi (Pusdatin Depsos) telah menetapkan kriteria untuk masing-masing PMKS berdasarkan hasil diskusi dengan unit teknis terkait. Adanya keanekaragaman kondisi masyarakat yang ada di berbagai wilayah Indonesia, secara logis akan menggambarkan jenis PMKS yang beragam, dan dengan ciri-ciri yang khusus untuk tiap jenis PMKS. Untuk itu dalam menangani masalah PMKS diperlukan pula program/kegiatan yang sesuai dengan kondisi setempat. Konsekuensinya adalah perlu diketahui secara jelas kondisi obyektif permasalahan yang ada pada tiap wilayah. Sehingga bisa dimunculkan variasi program/kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal, dan diharapkan akan mencapai sasaran dan hasil yang optimal.

Sebenarnya setiap masyarakat mempunyai cara sendiri dalam menangani masalah melalui pengelolaan sumber-sumber yang ada. Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada pada diri mereka. Potensi kesejahteraan sosial tersebut ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial (antara lain dalam bentuk lembaga sosial). Masalahnya adalah kemampuan lembaga sosial pada tiap masyarakat berbeda-beda. Menurut Koentjaraningrat, kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (dikutip dari Suradi dkk, 2008). Dalam kondisi tertentu masyarakat memerlukan uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya meskipun kadang-kadang uluran tangan tersebut kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

3. Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal tidaklah identik dengan daerah terpencil, tetapi daerah tertinggal mung-

kin merupakan daerah yang terpencil. Sebutan tertinggal lebih berorientasi kondisi daerah yang kurang berkembang dibanding daerah lain, atau dianggap kurang kemajuan dibanding daerah-daerah lainnya. Sedangkan terpencil biasanya lebih mengacu pada posisi geografis dan keterbatasan komunikasi dengan daerah lain. Daerah tertinggal secara umum sering digambarkan sebagai daerah yang dominan dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

Kondisi daerah tertinggal pada umumnya, sering kurang terjangkau pembangunan secara memadai, dan memiliki sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Masyarakat di daerah tertinggal dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh masyarakat di daerah tertinggal meliputi kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah-masalah ini memunculkan berbagai masalah antara lain keterlantaran anak, masalah perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni, SDM yang rendah, dan rendahnya akses terhadap sumber-sumber pelayanan yang ada (baik pendidikan maupun kesehatan). Kondisi kemiskinan masyarakat tersebut biasanya mendorong mereka terlibat dalam kegiatan migrasi. Hal ini dilakukan antara lain karena keterbatasan sumber yang ada di daerahnya, dan peluang kerja di daerah atau negara lain yang menjanjikan penghasilan yang lebih baik. Banyak kasus daerah-daerah tergolong miskin merupakan pemasok tenaga kerja terbesar, terutama tenaga kerja ke luar negeri (menjadi TKI/TKW).

Memahami kondisi spesifik masyarakat, dan berbagai isu yang berkembang pada masyarakat di daerah tertinggal tersebut di atas, menggambarkan bahwa masyarakat daerah tertinggal, memiliki banyak dimensi. Implikasinya, bahwa *assessment* daerah tertinggal perlu menggunakan berbagai perspektif guna memperoleh informasi yang mendalam tentang kondisi, masalah, sumber sumber dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan program-program pembangunan bagi daerah tertinggal perlu didasarkan pada pendayagunaan potensi dan sumber lokal secara optimal. Dalam konsep pekerjaan sosial, pembangunan atau pengembangan masyarakat sering dikenal sebagai "*community development*". Tujuan utama dari pengembangan masyarakat menurut

Glen (Isbandi, 2001) adalah mengembangkan kemandirian dan, pada dasarnya, memantapkan rasa kebersamaan sebagai komunitas berdasarkan basis "ketetanggaan" (*neighbourhood*), meskipun bukan secara eksklusif. Selanjutnya Glen menyatakan bahwa dalam pendekatan ini *community worker* sebaiknya mendasarkan pada "kebutuhan yang dirasakan" (*felt need*) oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chamber (Ginanjar, 1996) pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), tetapi juga keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting dalam pemberdayaan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Friedman (Ginanjar, 1996) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, lokal self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential sosial learning*". Untuk ini upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu:

- a. Menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya adalah dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) tentang potensi yang dimiliki.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*strengthening*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya.

Sejalan dengan pemikiran Friedman tersebut, menurut konsep pekerjaan sosial, ada lima pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 2005):

- a. Pemungkinan: menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mempunyai kesempatan berusaha.

Berdasarkan berbagai konsep pemberdayaan pada uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah membuat masyarakat tidak tergantung kepada pemberian bantuan atau program dan kegiatan dari luar dirinya, meskipun tidak berarti tidak dibutuhkan bantuan dari luar masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya mempunyai kualitas SDM yang memadai, akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Dengan demikian keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Kaitannya dengan daerah tertinggal, maka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum Desa Buwunmas

Nama Buwunmas sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sumber tambang emas di desa ini. Nama "*buwun*" berasal dari bahasa setempat yang berarti "sumur". Menurut tokoh setempat, dahulu di desa ini, tepatnya di Dusun Pengantap terdapat sebuah sumur yang konon airnya berwarna emas. Keberadaan sumur ini kemudian yang menjadi cikal bakal nama Buwunmas, yang berarti "sumur emas". Sebelumnya tidak terpikir atau diketahui oleh masyarakat setempat bahwa di desanya terdapat sumber tambang emas. Tambang emas di Buwun-mas baru diketahui masyarakat setelah adanya riset oleh PT Newmont. Bocoran hasil riset PT Newmont ini sampai kepada masyarakat, dan mendorongnya untuk berlomba-lomba melakukan penambangan emas meskipun secara ilegal.

Desa Buwunmas dilewati jalur jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Sekotong dengan Praya (Kabupaten Lombok Tengah). Kondisi jalan saat ini rusak parah dan berdebu, sehingga untuk menempuh jarak 11 km dari kota kecamatan ke desa bisa memakan waktu sekitar 1 jam lebih, dengan menggunakan

mobil atau sepeda motor. Angkutan umum ke desa ini relatif sangat terbatas, dengan jenis kendaraan yang kurang memenuhi syarat bagi penumpang (kendaraan pickup bak terbuka), atau dengan bus kecil yang akan menuju ke Praya (Lombok Tengah). Frekuensi angkutan ini relatif sedikit dan sering berubah trayek tergantung dari banyaknya tujuan penumpang.

Luas wilayah Desa Buwunmas sekitar 5.109 ha, dengan kondisi geografis daerah perbukitan dan pesisir pantai. Jumlah dusun yang ada seluruhnya 11 dusun (yakni: Seladong, Blongas, Sauh, Kombang, Plangan, Eyatbau, Pengantap, Sepi, Pangsing, Bengkang, dan Lemer), yang letaknya masing-masing cukup berjauhan. Areal pemukiman sebagian besar berada di areal yang relatif datar kecuali sebuah dusun yang terletak di pegunungan yakni Dusun Eyat Bau.

2. Sumber Daya Desa Buwunmas

a. Penduduk Buwunmas

Penduduk Buwunmas, menurut informasi beberapa tokoh setempat, bukan merupakan penduduk asli, tetapi berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Mula pertama mereka berada di Buwunmas adalah dengan adanya kebijakan pemerintah Kolonial Belanda memindahkan penduduk ke Buwunmas. Sesebuah desa mengartikan pemindahan ini sebagai "transmigrasi". Tidak diketahui secara jelas alasan perpindahan penduduk tersebut oleh pemerintah Belanda. Apakah untuk kepentingan perkebunan atau eksploitasi hutan. Yang jelas saat itu wilayah Buwunmas merupakan daerah perbukitan yang cukup subur. Kesuburan desa ini yang menurut tokoh setempat menjadi daya tarik penduduk di luar Buwunmas, terutama Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk hijrah ke daerah ini. Namun karena tidak ada kontrol masyarakat maka yang terjadi adalah pengundulan hutan, sehingga lahan yang ada menjadi rusak dan tergolong kritis.

Sampai saat ini masih ada kebiasaan penduduk menebang pohon di hutan/pegunungan, baik untuk keperluan bangunan, kayu bakar, atau membuka lahan. Sehingga kondisi daerah perbukitan yang dulunya cukup subur, saat ini terlihat gundul dan gersang. Sebagai akibatnya adalah minimnya sumber air di waktu musim kemarau. Banyak sungai dan saluran air dari pegunungan tampak kering di musim kemarau. Dengan demikian pada musim kema-

rau kegiatan pertanian secara umum relatif terhenti. Oleh karena itu di musim kemarau banyak penduduk petani menjadi penganggur, bekerja sebagai buruh atau mencari ikan di perairan Teluk Sepi yang dangkal.

Jumlah penduduk Buwunmas menurut catatan terakhir monografi desa (tahun 2008) 15.600 jiwa terdiri dari 8.551 jiwa laki-laki dan 7.049 jiwa perempuan. Jumlah KK yang ada seluruhnya 4.019 KK dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 sampai 5 orang. Pendidikan penduduk sebagian besar (sekitar 95%) masih di bawah SLA. Sementara itu keterampilan yang dimiliki umumnya di bidang pertanian dan nelayan tradisional. Lembaga pendidikan setingkat SD sudah ada 10 SD yang menyebar di beberapa dusun. Sekolah SLP baru ada di salah satu dusun (Dusun Sepi). Untuk Lembaga pendidikan setingkat SLTA yang terdekat berada di Dusun Sepi, yakni sebuah Madrasah-Aliyah swasta. Untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SLA negeri masih harus menempuh jarak yang cukup jauh yakni di kota Kecamatan Sekotong. Jarak Desa Buwunmas ke kota Kecamatan Sekotong sekitar 11 km, dan dengan sarana transportasi yang masih minim serta biaya yang cukup mahal (sekitar Rp 5.000,-). Bila menggunakan ojek dipungut biaya antara Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,-. Hal tersebut tampaknya juga mempengaruhi kemampuan penduduk untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi; di samping karena keadaan ekonomi penduduk yang umumnya rendah.

Kondisi perumahan penduduk sebagian besar rumah panggung, terbuat dari kayu (papan atau gedek bambu) dan beratapkan rumbia/alang-alang, dan dengan jumlah kamar rata-rata hanya satu buah. Sebagian besar dan hampir semua rumah penduduk mempunyai sejenis gubug/saung (menurut istilah setempat "beruga") yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu atau tempat makan dan ngobrol. Rumah penduduk umumnya menyatu dengan kandang atau tempat mengikat temak sapi, sehingga tampak banyak kotoran sapi berserakan disekitar pemukiman. Namun demikian tidak semua penduduk memelihara sapi, dan tidak semua sapi yang dipelihara merupakan milik pribadi, tetapi ada sebagian yang memelihara dengan cara bagi hasil.

b. Sosial Budaya

Penduduk Desa Buwunmas secara sosial budaya termasuk suku bangsa Sasak. Suku

Sasak ini umumnya beragama Islam, dan aturan adat penduduk banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun demikian beberapa adat leluhur yang tampaknya digabungkan dengan Islam masih hidup dalam masyarakat Buwunmas. Misalnya dalam hal perkawinan masih berlaku bagi pihak laki-laki untuk mengambil anak gadis (dalam istilah setempat mencuri gadis), meskipun saat ini sudah ada modifikasi pada mana pengambilan anak gadis telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak. Setelah anak gadisnya berada di keluarga pihak laki-laki, kemudian pihak orangtua perempuan diundang, dan disitu terjadi tawar-menawar uang tebusan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Sebelum akad nikah yang dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki, uang tebusan tersebut harus sudah terbayar. Tertundanya pembayaran uang tebusan, meskipun telah terjadi akad nikah secara Islam dan dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama KUA), dikatakan oleh mereka sebagai tidak sah perkawinannya secara adat.

Upacara pernikahan tidak terjadi di kediaman mempelai wanita tetapi di kediaman mempelai laki-laki. Pada saat upacara tersebut ada acara pengantin berkunjung, menghadap orangtua mempelai perempuan untuk mendapatkan restu/ijin, dan selanjutnya mempelai perempuan akan kembali ke kediaman keluarga laki-laki, dan akan menetap serta sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak laki-laki. Oleh karena itu biasanya laki-laki yang akan menikah haruslah mempunyai rumah yang akan ditempati kemudian bersama isterinya. Dapat dikatakan bahwa perempuan yang sudah dinikahi seorang laki-laki dan telah dibayar tebusannya, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab suaminya. Menurut informasi dari penduduk setempat, selama ini tidak pernah ada seorang isteri atau yang sudah menjadi janda kembali tinggal bersama keluarganya.

Mengenai poligami, pada masyarakat Buwunmas secara umum tidak mendapat tantangan atau larangan bagi masyarakat. Bagi mereka yang mampu secara ekonomi, dan mampu membayar tebusan yang diminta oleh pihak calon isteri, bisa menikah lagi atau beristeri lebih dari satu.

c. Sumber Daya Alam Desa Buwunmas

Sumber daya alam di Desa Buwunmas sebenarnya cukup memadai. Daerah ini meru-

rau kegiatan pertanian secara umum relatif terhenti. Oleh karena itu di musim kemarau banyak penduduk petani menjadi penganggur, bekerja sebagai buruh atau mencari ikan di perairan Teluk Sepi yang dangkal.

Jumlah penduduk Buwunmas menurut catatan terakhir monografi desa (tahun 2008) 15.600 jiwa terdiri dari 8.551 jiwa laki-laki dan 7.049 jiwa perempuan. Jumlah KK yang ada seluruhnya 4.019 KK dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 sampai 5 orang. Pendidikan penduduk sebagian besar (sekitar 95%) masih di bawah SLA. Sementara itu keterampilan yang dimiliki umumnya di bidang pertanian dan nelayan tradisional. Lembaga pendidikan setingkat SD sudah ada 10 SD yang menyebar di beberapa dusun. Sekolah SLP baru ada di salah satu dusun (Dusun Sepi). Untuk Lembaga pendidikan setingkat SLTA yang terdekat berada di Dusun Sepi, yakni sebuah Madrasah-Aliyah swasta. Untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SLA negeri masih harus menempuh jarak yang cukup jauh yakni di kota Kecamatan Sekotong. Jarak Desa Buwunmas ke kota Kecamatan Sekotong sekitar 1 km, dan dengan sarana transportasi yang masih minim serta biaya yang cukup mahal (sekitar Rp 5.000,-). Bila menggunakan ojek dipungut biaya antara Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,-. Hal tersebut tampaknya juga mempengaruhi kemampuan penduduk untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi; di samping karena keadaan ekonomi penduduk yang umumnya rendah.

Kondisi perumahan penduduk sebagian besar rumah panggung, terbuat dari kayu (papan atau gedek bambu) dan beratapkan rumbia/alang-alang, dan dengan jumlah kamar rata-rata hanya satu buah. Sebagian besar dan hampir semua rumah penduduk mempunyai sejenis gubug/saung (menurut istilah setempat "beruga") yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu atau tempat makan dan ngobrol. Rumah penduduk umumnya menyatu dengan kandang atau tempat mengikat temak sapi, sehingga tampak banyak kotoran sapi berserakan disekitar pemukiman. Namun demikian tidak semua penduduk memelihara sapi, dan tidak semua sapi yang dipelihara merupakan milik pribadi, tetapi ada sebagian yang memelihara dengan cara bagi hasil.

b. Sosial Budaya

Penduduk Desa Buwunmas secara sosial budaya termasuk suku bangsa Sasak. Suku

Sasak ini umumnya beragama Islam, dan aturan adat penduduk banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun demikian beberapa adat leluhur yang tampaknya digabungkan dengan Islam masih hidup dalam masyarakat Buwunmas. Misalnya dalam hal perkawinan masih berlaku bagi pihak laki-laki untuk mengambil anak gadis (dalam istilah setempat mencuri gadis), meskipun saat ini sudah ada modifikasi pada mana pengambilan anak gadis telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak. Setelah anak gadisnya berada di keluarga pihak laki-laki, kemudian pihak orangtua perempuan diundang, dan disitu terjadi tawar menawar uang tebusan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Sebelum akad nikah yang dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki, uang tebusan tersebut harus sudah terbayar. Tertundanya pembayaran uang tebusan, meskipun telah terjadi akad nikah secara Islam dan dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama KUA, dikatakan oleh mereka sebagai tidak sah perkawinannya secara adat.

Upacara pernikahan tidak terjadi di kediaman mempelai wanita tetapi di kediaman mempelai laki-laki. Pada saat upacara tersebut ada acara pengantin berkunjung, menghadap orangtua mempelai perempuan untuk mendapatkan restu/ijin, dan selanjutnya mempelai perempuan akan kembali ke kediaman keluarga laki-laki, dan akan menetap serta sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak laki-laki. Oleh karena itu biasanya laki-laki yang akan menikah haruslah mempunyai rumah yang akan ditempati kemudian bersama isterinya. Dapat dikatakan bahwa perempuan yang sudah dinikahi seorang laki-laki dan telah dibayar tebusannya, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab suaminya. Menurut informasi dari penduduk setempat, selama ini tidak pernah ada seorang isteri atau yang sudah menjadi janda kembali tinggal bersama keluarganya.

Mengenai poligami, pada masyarakat Buwunmas secara umum tidak mendapat tantangan atau larangan bagi masyarakat. Bagi mereka yang mampu secara ekonomi, dan mampu membayar tebusan yang diminta oleh pihak calon isteri, bisa menikah lagi atau beristeri lebih dari satu.

c. Sumber Daya Alam Desa Buwunmas

Sumber daya alam di Desa Buwunmas sebenarnya cukup memadai. Daerah ini meru-

pakan daerah perbukitan yang cukup dekat dengan laut, dan dengan kondisi pantai yang cukup bisa dikembangkan sebagai obyek wisata. Sebelum diketahuinya tambang emas di daerah ini, sumber alam andalan penduduk adalah tambang batu hitam (mangan), hutan (kayu), dan sumber laut (udang lobster). Mulanya di samping sebagai petani atau nelayan, penduduk Buwunmas banyak yang bekerja menggali batu hitam. Namun setelah adanya bocoran hasil riset PT Newmont tentang sumber emas, maka tambang batu hitam dan kegiatan lainnya banyak ditinggalkan penduduk, dan beralih perhatiannya pada penggalian tambang emas secara liar.

Dapat dikatakan bahwa saat penelitian ini dilakukan, sebagian besar penduduk Buwunmas sedang menghadapi "demam" emas. Dampak emas tersebut, tidak hanya tambang batu hitam yang ditinggalkan oleh penduduk, tetapi juga kegiatan lain seperti pertanian, nelayan, dan bahkan kegiatan sosial maupun keagamaan kurang mendapat perhatian penduduk. Hanya sebagian kecil penduduk yang masih melakukan aktivitas sebagaimana sebelum adanya demam emas. Menurut informasi penduduk setempat, sebenarnya banyak resiko yang dihadapi dalam penggalian emas ini, dan bahkan telah banyak memakan korban. Banyak penduduk yang mendadak kaya karena emas, tetapi banyak pula penduduk yang makin menjadi miskin karena emas. Seorang kepala dusun sambil berkelakar mengatakan bahwa *"dalam hal penambangan emas, ada tiga hal yang pasti, yakni menjadi kaya, atau menjadi miskin, atau mati karena tertimbun dalam lubang"*.

Modal yang diperlukan untuk memperoleh "harapan" mendapat emas, mulai menggali sampai melihat hasilnya sekitar Rp.80.000,- sampai Rp. 100.000,- per karung batu/tanah yang diperkirakan mengandung emas. Mengapa diperkirakan, karena tidak semua karung dapat menghasilkan emas. Banyak batu/tanah yang dibawa dan diolah tidak menghasilkan emas sedikitpun. Dalam peristiwa semacam ini oleh penduduk setempat disebut "lolos", yang berarti tidak memperoleh emas dan kehilangan uang modalnya. Belum lagi persaingan dalam perebutan lubang emas yang merupakan masalah tersendiri. Bahkan menurut ceritera para penambang sering saling berkelahi di dalam lubang. Belum lagi persaingan dengan penda-

tang dari Jawa dan pulau lainnya (terutama Jawa Barat, dan Kalimantan), serta dari daerah lainnya, yang relatif mempunyai pengalaman dan pengetahuan serta keterampilan yang lebih tinggi daripada penduduk setempat.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti selama dilapangan, dalam hal mencari rejeki dari emas tersebut tampaknya bagi yang bermodal besar akan makin kaya. Apalagi bagi mereka yang mempunyai alat pengolahan (oleh masyarakat setempat disebut: *Cilandang*) ternyata memberikan keuntungan yang cukup besar. Para penadah emas, yakni pemilik modal dapat keuntungan yang cukup besar untuk setiap gram emas (sekitar Rp.20.000,- sampai Rp. 40.000,-). Mereka ini yang paling kecil berisiko, dibandingkan para penambang yang harus mengeluarkan tenaga dan uang. Tampaknya model penggalian emas secara liar, tidak terorganisir tersebut berpotensi untuk terjadinya konflik dalam masyarakat. Masalah potensial lainnya adalah dampak negatifnya terhadap lingkungan, mengingat pengolahan emas saat ini tidak dilakukan di lokasi penambangan, tetapi di lingkungan pemukiman penduduk.

Sumber daya alam yang berasal dari kebun, dan mempunyai prospek cukup cerah, baik dilihat dari kecocokan dengan kondisi tanah maupun harga jual hasil yang cukup memadai, adalah tanaman jambu mete. Jenis tanaman ini mulai dikenalkan oleh instansi pertanian setempat kepada penduduk pada dua atau tiga tahun terakhir. Saat ini tanaman jambu mete ini baru mulai berbuah dan mulai panen pertama. Meskipun saat ini produk biji jambu mete masih terbatas dan dengan harga jual biji mete yang masih rendah, Saat ini penduduk belum dapat menjual biji mete dalam bentuk olahan yang cukup tinggi nilainya, tapi dalam bentuk bahan mentah. Ke depan sekiranya penduduk mampu mengolah menurut kebutuhan pasar, akan menjadi sumber ekonomi penduduk yang bisa diharapkan.

d. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial

Keberadaan pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi penduduk masih sangat terbatas. Kegiatan pasar di Desa Buwunmas hanya terjadi satu kali dalam seminggu (tiap hari Senin). Bila dilihat dari kegiatannya, pasar ini sangat mirip dengan "pasar tumpah" di daerah Indramayu dan Cirebon (Jawa Barat), atau "pasar kaget" istilah di Jakarta. Para penjual

berdatangan dari luar Desa Buwunmas, antara lain untuk jenis sayuran banyak berasal dari wilayah Gerung. Penjual dari penduduk setempat sangat terbatas, misalnya penjual ikan, ayam kampung dan biji jambu mete.

Warung-warung yang ada di Buwunmas meskipun jumlahnya cukup banyak, namun jenis bahan yang dijual sebagian besar berupa makanan kering, sabun, rokok dan minuman kemasan. Untuk kebutuhan jenis sayuran atau lauk-pauk tidak setiap saat tersedia di warung tersebut. Sementara ini kebutuhan sayuran penduduk di samping dari pasar mingguan, juga sebagian berasal hasil kebun dan dengan variasi yang terbatas pada jenis kacang-kacangan. Terkait dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dialami penduduk, adalah cukup tingginya harga-harga kebutuhan pokok dapat dikatakan jauh lebih mahal daripada di kota besar seperti Jakarta.

Lembaga-lembaga pelayanan sosial maupun lembaga kemasyarakatan yang dapat diakses penduduk, dapat dikatakan tidak terlihat keberadaannya. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), lembaga sosial masyarakat juga tidak tampak keberadaannya. Menurut informasi dari Dinas Sosial Lombok Barat, sebenarnya telah banyak pranata sosial di Buwunmas yang mengalami kemunduran sebagai akibat maraknya penambangan emas secara liar/ilegal.

Kegiatan sosial yang hingga kini masih dilakukan penduduk setempat, adalah kegiatan menyantuni anak-anak yatim, meskipun sifatnya perorangan, terutama saat akan pergi "haji" atau menghadapi hari raya Islam. Kegiatan sosial lain yang tampak masih ada yakni, berupa sumbangan warga pada saat acara pernikahan. Dari siapa sumbangan ini berasal, seberapa besar, berupa apa, akan diingat oleh si penerima dan akan dibalas kembali bila si penyumbang menikahkan anak/keluarganya. Seolah-olah sumbangan ini merupakan hutang yang harus dibayar kemudian.

Pandangan tersebut diatas juga dikuatkan oleh tokoh setempat, bahwa pranata sosial penduduk Buwunmas, berupa pranata adat maupun keagamaan sebelumnya cukup memadai. Namun dari pemantauan mereka selama ini, kegiatan penambangan emas mampu merusak pranata-pranata sosial dan keaga-

maan yang ada. Dengan adanya "demam emas" sekarang ini ada kecenderungan sebagian besar penduduk kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Mereka berlomba-lomba mengais rejeki dari penambangan emas, meskipun harus meninggalkan ibadah rutin keagamaannya.

3. Masalah Sosial Desa Buwunmas

Secara umum masalah sosial yang dihadapi penduduk Buwunmas adalah masalah kemiskinan. Penyebabnya terutama pada kondisi geografis yang berbukit dan gundul, minimnya sumber air bersih, serta minimnya sumber air bagi pertanian terutama di musim kemarau. Oleh karena itu pada musim kemarau sebagian besar penduduk praktis tidak bekerja. Sementara itu bagi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan juga dipengaruhi oleh musim angin dan besarnya gelombang laut. Kecuali di wilayah Teluk Sepi kegiatan mencari ikan masih berjalan, tetapi dengan hasil berupa jenis ikan kecil yang kurang mempunyai nilai ekonomi. Pemasarannya juga masih sangat terbatas. Sebagian besar hasil ikan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarganya.

Hasil diskusi dan identifikasi oleh masyarakat, masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan di enam dusun (Bengkang, Pengantap, Pangsing, Eyat Bau, Belongas, dan Selo-dong.) yakni banyaknya rumah tidak layak huni, dan anak-anak yang terlantar (kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya). Menyertai masalah ini adalah adanya anak-anak putus sekolah. Mereka berusia antara 13 sampai dengan 20 tahun. Kegiatan mereka adalah membantu orangtua, baik dalam pekerjaan rumah maupun mencari nafkah. Anak-anak ini tidak mempunyai keterampilan yang cukup untuk usaha lain di luar pertanian. Adanya anak-anak terlantar dan putus sekolah di Desa Buwunmas, meskipun saat ini jumlahnya tidak terlalu besar (lihat tabel), tetapi dengan kondisi ekonomi keluarga yang rendah, maka bila tidak ada upaya penanggulangan, jumlah anak-anak terlantar dan putus sekolah ini akan makin bertambah dari waktu ke waktu. Sebagai akibatnya, ke depan masyarakat Buwunmas akan menghadapi masalah SDM yang rendah sehingga sulit untuk mencapai kemajuan, apalagi dengan kondisi infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Masalah lain yang juga dihadapi penduduk Buwunmas adalah keberadaan sejumlah

"janda TKI" yang relatif tidak punya penghasilan tetap. Sementara masih ada hutang yang harus ditanggung sebagai biaya suaminya berangkat sebagai TKI. Oleh karena itu dari hasil pengamatan selama di lapangan, terlihat bahwa menu makan mereka sehari-hari umumnya sangat sederhana. Banyak anak-anak mereka yang tampaknya kurang terjamin kebutuhan dasarnya.

Kehidupan lanjut usia juga merupakan fenomena tersendiri, mereka umumnya tinggal sendiri dalam kondisi kemiskinan dan tempat tinggal yang tidak layak. Sebagian besar mereka memperoleh pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari dari bantuan anaknya yang juga miskin. Dari segi fisik, sebagian besar mereka terlihat masih bisa melakukan aktivitas kehidupan secara mandiri, meskipun dalam kondisi yang lemah/sakit-sakitan.

Masalah yang tampaknya berpotensi untuk bertambah adalah anak nakal, meskipun saat ini jumlahnya masih sangat kecil. Berkembangnya kegiatan penambangan emas, ternyata banyak memberikan kejutan bagi kehidupan ekonomi masyarakat Buwunmas. Mereka lebih konsumtif, hasil mereka digunakan untuk membeli sepeda motor, TV, dan generator (untuk TV dan penerangan). Hal ini memunculkan fenomena banyaknya anak-anak yang mengendarai motor dengan ugol-ugalan, model rambut gaya kota, meskipun berkendara tanpa baju dan hanya dengan kain sarung berada di pundaknya. Bahkan menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat, disinyalir ada sekelompok pemuda yang mulai mengenal minuman keras.

Kegiatan anak/remaja yang bersifat positif, yang bisa mendukung kebutuhan anak/remaja, misalnya kesenian, olah raga dan berorganisasi, saat ini mulai menghilang dalam kehidupan anak/remaja yang tampak berkembang adalah berkendara sepeda motor ala "bikers" dengan suara knalpot yang cukup keras. Beberapa kegiatan positif yang masih dilakukan adalah kegiatan keagamaan/pesantren, meskipun pesertanya masih terbatas. Apalagi adanya "demam eras", ada kecenderungan mereka yang berada di lokasi tambang sering melalaikan kegiatan ibadah rutin yang sebelumnya biasa mereka lakukan. Kalau hal ini makin meluas dalam kehidupan masyarakat, maka bukan tidak mungkin bahwa kehidupan mental spiritual masyarakat Buwunmas akan makin jauh dari kehidupan keagamaan yang positif.

Tabel :
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Lusa Dusun - Desa Buwunmas
(Bengkang, Pengantap, Pangasing, Lya Bau, Belangas dan Saludang)

No.	Jenis PMKS	Kriteria Lokal	Jumlah
1.	Bakia terlantar	Anak usia 0 - 5 Tahun Kurang nutrisi Tidak mendapatkan kebutuhan yang wajar Umumnya berada di lingkungan miskin	333
2.	Anak terlantar	Anak usia 5 tahun lebih s.d 18 tahun Belum sekolah atau masih sekolah Orang tua kurang mampu Kurang nutrisi	66
3.	Anak putus sekolah	Andi/remaja usia 13 - 20 tahun Pernah sekolah Belum/tidak bekerja Belum menikah Orang tua umumnya kurang mampu Tidak ada keterampilan khusus	153
4.	Anak nakal	Usia remaja 13 - 20 tahun Tidak sekolah lagi Melakukan kegiatan menyimpang, seperti berjudi, berpacir, minum dan merokok	2
5.	Keluarga fakir miskin	Mempunyai pekerjaan atau tidak Umumnya bekerja di bidang pertanian atau buruh serabutan Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga Umumnya tinggal di rumah tak layak huni	1.144
6.	Rumah tidak layak huni	Rumah panggung Dinding gedek, atap rumbia, lantai bambu Ventilasi kurang Pembagian ruangan sangat terbatas (hanya ada sebuah kamar) Pembuangan limbah tidak teratur	1.273
7.	Lanjut Usia terlantar	Usia 60 tahun lebih Tidak bekerja Tinggal sendiri (suami meninggal), atau dengan anak Kondisi fisik sakit-sakitan Kurang terpenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Tinggal di rumah tak layak huni	389
8.	Penyandang cacat	Usia anak atau dewasa Jenis cacatan mata, tubuh, bisu, dan mental Tidak sekolah, tidak bekerja Keluarga kurang mampu	46
9.	Keluarga Pekerja migran bermasalah	Janda TKI ke Malaysia Tidak mendapatkan kiriman uang dari suami Tidak/kurang ada kontak dengan suami Tidak mempunyai pekerjaan Umumnya punya anak balita Tinggal di rumah tak layak huni	3
10.	Wanita miskin sosial ekonomi	Status janda (jara mati atau cara kelap) Punya anak usia sekolah Tidak mempunyai pekerjaan tetap Tidak mampu memenuhi kebutuhan	133

Sumber: hasil penelitian

4. Program-program Pemerintah di Desa Buwunmas

Berkaitan dengan permasalahan umum yang dihadapi penduduk Buwunmas, sebenarnya telah ada beberapa program pemerintah yang telah masuk. Dari informasi penduduk dan hasil pengamatan terhadap barang bantuan, jenis bantuan yang pernah ada berupa

bantuan perahu nelayan (dari Departemen Sosial dan Departemen Kelautan), bantuan usaha tani, penyediaan Puskesmas Pembantu dan Polindes, listrik tenaga surya, dan budi daya rumput laut (baru dimulai). Menurut informasi dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, dalam tahun 2010 akan dikembangkan pula program listrik tenaga angin. Bila hal ini dapat terwujud sesuai rencana, maka diharapkan kebutuhan listrik desa akan terpenuhi.

Kondisi perkembangan bantuan perahu saat ini tampak beberapa perahu tidak beroperasi lagi dan sebagian dalam kondisi rusak. Fisik perahu yang terbuat dari fiberglass tampaknya kurang tahan terhadap cuaca yang terlalu panas. Apalagi dengan pengetahuan penduduk yang terbatas dalam perawatan fiberglass, menjadikan perahu bantuan tersebut tidak dapat dirawat dengan baik. Mereka tampaknya terbiasa menggunakan perahu-perahu dari kayu yang relative lebih tahan terhadap benturan dengan benda keras seperti batu atau karang.

Bantuan usaha tani untuk sawah pertanian, antara lain berupa bibit dan pupuk. Bantuan yang tampaknya mulai memberikan hasil adalah penanaman bibit buah jambu mete. Setelah tiga tahun ini (pertama berbuah) telah menghasilkan buah per pohon sekitar 1 kg biji basah. Harga jual biji jambu ini saat ini sekitar Rp. 4.000,- sampai Rp. 6.000,- per kg. Dalam musim buah rata-rata per minggu untuk tiap pemilik bisa menjual sekitar 25 kg. Hal yang cukup berat bagi petani adalah mahal biaya angkut, yakni dengan ojek sekitar Rp 10.000,- pulang balik. Penjualan biji mete per minggu ini mengikuti jadwal pasar yang ada di desa yakni tiap hari senin. Untuk pertanian sawah/ladang, kendala yang dihadapi adalah kondisi lahan tadah hujan yang cukup kering di musim kemarau. Kendala lain adalah belum meluasnya upaya penanaman pohon mete, karena masih terbatasnya jumlah dan jangkauan bantuan, serta kurangnya keterampilan dalam pengolahan biji mete. Bila dilihat dari kondisi alam Desa Buwunmas, tampaknya tanaman jambu mete ini paling cocok untuk dikembangkan.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut di atas, dan hasil wawancara dengan instansi terkait, menyebutkan bahwa sebenarnya telah banyak program dan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik di desa Buwunmas. Namun munculnya demam emas dalam bebe-

rapa tahun terakhir ini menyebabkan berbagai program pembangunan di desa ini mengalami kemunduran, dan banyak infrastruktur desa mengalami kerusakan. Dapat dikatakan bahwa ramainya kegiatan tambang emas ilegal menjadikan kerusakan pada infrastruktur sosial di desa Buwunmas.

Sebenarnya melihat potensi alam desa ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencaangkan sebagai daerah pengembangan wisata. Niat ini akan terus dilanjutkan dengan cara kebijakan memberhentikan penambangan emas ilegal, menetapkan alternatif pengembangan wilayah lainnya. Namun apakah hal ini akan terwujud akan tergantung dari besarnya niat dan upaya Pemda serta kemauan masyarakat untuk melakukan perubahan. Penghentian penambangan emas secara ilegal bukanlah upaya mudah banyak kelompok-kelompok yang saat ini memperoleh keuntungan dari penambangan liar akan menentang kebijakan Pemda. Sehingga bisa memunculkan gelombang protes yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Desa Buwunmas yang kaya dengan sumber daya alam, ternyata tidak serta merta membawa kemakmuran bagi penduduk. Kegiatan eksploitasi alam khususnya tambang emas ilegal yang tidak terkontrol, berdampak pada terjadinya gap yang cukup besar antara penduduk yang makin kaya karena emas dan yang makin miskin karena emas.
- Mereka yang paling besar menerima keuntungan dari tambang emas adalah yang tergolong kaya, mempunyai keterampilan, dan mempunyai modal besar. Penghasilan besar mungkin diperoleh penduduk kurang mampu hanya sesaat, terutama bagi mereka yang beruntung. Tampaknya pengelolaan sumber emas secara ilegal dan masih bersifat kompetitif, tidak diorganisir dengan baik, menjadikan tidak semua penduduk dapat merasakan manfaatnya.
- Masalah lain yang terkait dengan penambangan emas adalah dampak negatif terhadap lingkungan pemukiman, berupa pencemaran merkuri terhadap sumber air penduduk dan infrastruktur desa. Masalah

pencemaran tersebut meskipun saat ini belum tampak nyata dampak negatifnya terhadap lingkungan, namun diperkirakan bila hal ini tidak terkendali, maka dalam jangka panjang akan berdampak cukup besar terhadap kualitas hidup penduduk.

- d. Secara umum kondisi infra struktur Desa Buwunmas saat ini dalam kondisi kurang memadai. Kondisi jalan penghubung ke desa rusak parah (berdebu di musim kemarau, dan licin di musim hujan) sarana transportasi terbatas, belum ada sarana penerangan listrik yang cukup memadai, tidak ada jaringan komunikasi telepon kabel maupun seluler, dan terbatasnya sumber air bersih. Kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan juga mengalami kemunduran.
- e. Masalah utama yang dihadapi penduduk adalah masalah pengangguran yang tidak kentara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dengan kondisi tanah tadah hujan, merupakan kendala bagi mereka untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Oleh karena itu diketahuinya tambang emas di daerah ini serta merta menjadi daya tarik yang cukup besar bagi penduduk untuk berlomba mengais rejeki dari tambang emas, meskipun tidak selalu membawa hasil yang memadai, dan justru bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
- f. Masalah sosial yang menonjol di wilayah Buwunmas adalah kemiskinan (fakir miskin) dan rumah tidak layak huni. Masalah ini menjadi sumber munculnya berbagai masalah sosial lain terutama keterlantaran (anak terlantar dan putus sekolah dan lanjut usia terlantar). Adanya jumlah warga yang menjadi TKI, memunculkan pula sejumlah wanita rawan sosial ekonomi (antara lain janda TKI).
- g. Lembaga-lembaga pelayanan sosial maupun lembaga kemasyarakatan yang dapat diakses penduduk, dapat dikatakan tidak terlihat keberadaannya. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), lembaga sosial masyarakat tidak tampak keberadaannya. Menurut informasi dari Dinas Sosial Lombok Barat, banyak pranata sosial di Buwunmas yang mengalami kemunduran sebagai akibat

maraknya penambangan emas secara liar/ilegal.

- h. Meskipun Buwunmas digolongkan sebagai daerah tertinggal, beberapa program pembangunan telah banyak masuk ke desa ini. Namun demikian karena kurangnya keterampilan penduduk untuk mengembangkan bantuan pemerintah di satu sisi, dan kurangnya pendampingan/monitoring, maka banyak program yang kurang berkembang. Bila hal itu tidak segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat maupun daerah, diperkirakan masalah kemiskinan penduduk di masa depan akan tetap menyatu dalam kehidupan masyarakat Buwunmas. Bahkan persaingan dalam mengais rejeki dari tambang emas yang tidak teratur dan tidak terkontrol merupakan potensi besar terjadinya konflik dalam masyarakat.

2. Rekomendasi

Melihat berbagai masalah yang ada di Desa Buwunmas, maka rekomendasi yang bisa disampaikan adalah seperti berikut:

- a. Program-program Kesejahteraan Sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan Desa Buwunmas adalah:
 - 1 Program penyuluhan sosial, yang berfokus pada pengetahuan dan pemahaman penduduk tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial, dan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang bisa diakses penduduk.
 - 2 Program perbaikan gizi dan kesehatan bagi Balita terlantar.
 - 3 Program bantuan untuk anak-anak terlantar, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama kebutuhan pangan, pakaian, papan, dan pendidikan.
 - 4 Program pembinaan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah terlantar, diperlukan baik melalui panti maupun di luar panti.
 - 5 Program pemberdayaan fakir miskin (termasuk wanita rawan sosial ekonomi) melalui usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi setempat (usaha warung sembako, pertanian, dan nelayan). Bantuan ini hendaknya diberikan secara individual (tidak secara kelompok).

- pak), agar tidak terjadi konflik dalam pengelolaannya. Kelompok mempunyai fungsi sebagai tempat belajar dan melakukan bargaining dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan pemilik sumber dan pasar.
- 6 Program pemberdayaan fakir miskin melalui perbaikan/ renovasi rumah (semacam bedah rumah) bagi rumah tak layak huni.
 - 7 Program pelayanan bagi lanjut usia terlantar dalam bentuk jaminan sosial, dan atau "day care".
 - 8 Program pembinaan dan pengembangan PSKS seperti penumbuhan dan pengembangan PSM serta Karang Taruna, termasuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam masyarakat dapat tumbuh dan berkembang untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul.
- b. Program-program perbaikan infrastruktur yang mendukung kemajuan desa, yakni;
 - 1 Perbaikan sarana jalan penghubung desa dengan kota kecamatan dan desa-desa lainnya;
 - 2 Penyediaan sarana penerangan listrik yang direncanakan oleh instansi PU dengan jenis tenaga angin, hendaknya dirancang berdasarkan survey potensi angin yang ada dan disertai model perawatan yang menjamin keberlangsungannya. Misalnya dengan memberikan pendampingan dan atau pelatihan bagi masyarakat.
 - 3 Program peningkatan kualitas air bersih.
 - 4 Perbaikan dan penataan lingkungan pertanian dan perumahan.
 - c. Program-program alternatif terkait dengan kondisi wilayah, misalnya realisasi ide daerah untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong khususnya Desa Buwunmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, UI-Press, Jakarta.
- Ife, Jim, 2002, *Community Development*, Longman: Australia.
- Kartasasmita, Ginajar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Bandung.
- Soetrisno, Laekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suradi dkk, 2008, *Penelitian masalah kebutuhan dan sumber daya masyarakat daerah terpencil (Kasus Miangas)*, Puslitbang Kesos, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan*

Biodata Penulis :

Sutaat adalah Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badiklit Kesejahteraan Sosial.